



Laporan Akuntabilitas Kinerja 2023

Direktorat Layanan dan Pemanfaatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bekerja dan berkarya bagi bangsa dan negara tercinta. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan capaian kinerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan pada Tahun 2023. Direktorat Layanan dan Pemanfaatan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bertugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kearsipan pengelolaan arsip statis dalam rangka pelestarian arsip. Adapun Layanan dan Pemanfaatan arsip statis yang dimaksud dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis baik secara preventif maupun kuratif.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) merupakan sarana kontrol dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja yang telah disepakati. Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur tentang tata cara penyampaian laporan tersebut. LAKIN merupakan instrumen yang digunakan dalam memenuhikewajiban dan sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui tugas Direktorat Layanan dan Pemanfaatan. Oleh karena itu, LAKIN perlu disusun sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari beberapa komponen, antara lain: perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi.

Dengan demikian maka LAKIN Direktorat Layanan dan Pemanfaatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa datang.

Jakarta, 8 Januari 2023
Direktur Layanan dan Pemanfaatan,



Eli Ruliawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tugas Pokok Dan Fungsi	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Penetapan Kinerja 2023.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Pengukuran Kinerja	12
B. Evaluasi Kinerja	12
C. Analisis Akuntabilitas Kinerja	26
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan.....	31
B. Rekomendasi	31

IKHTISAR

Kegiatan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan pada Tahun 2022 mengacu pada Rencana Tahunan ANRI dan Rencana Strategis ANRI tahun 2020-2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan menyajikan semua keberhasilan atas target capaian yang tercermin dalam Indikator Kinerja maupun Analisis Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun realisasi penyerapan anggaran Direktorat Layanan dan Pemanfaatan pada Tahun 2023 sebesar **Rp 3,080,857,020 (Tiga Milyar Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Ruapiah)** atau **96.69%** dari pagu anggaran kegiatan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan yang dibiayai oleh APBN ANRI Tahun 2023 dan PNBPN sejumlah **Rp 3,186,191,000 (Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu)**.

Beberapa kendala yang terjadi pada proses pelaksanaannya akan kami jelaskan lebih lanjut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indikator keberhasilan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan diukur dari kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan *good governance* dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus mampu memberikan pelayanan yang akuntabel (pelayanan prima) khusus di bidang kearsipan kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kearsipan nasional diantaranya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya (UU 43/2009 Pasal 3 ayat h) maka ANRI diharapkan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan pasal 34 ayat 1 yang mengamanatkan negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

ANRI melalui Direktorat Layanan dan Pemanfaatan memberikan pelayanan publik sesuai dengan tugasnya yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pengendalian di bidang layanan dan pemanfaatan arsip.

Direktorat Layanan dan Pemanfaatan sebagai organisasi mempunyai visi dan misi yang merupakan perwujudan dari misi Arsip Nasional Republik Indonesia yang ke 4 (empat) yaitu: Melestarikan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa dalam Kerangka NKRI. Adapun visi dari Direktorat Layanan dan Pemanfaatan adalah “Menjamin Akses Arsip Statis dan Pemanfaatan Arsip dalam rangka penyebarluasan informasi.” Untuk meraih visi tersebut, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan menjabarkan ke dalam misi-misi sebagai berikut:

1. Memberikan Akses Arsip kepada Publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai kaidah kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa

2. Melaksanakan Kegiatan pemanfaatan Arsip Statis untuk kepentingan masyarakat dan Negara melalui kegiatan Citra Daerah, Pameran dan pembuatan Naskah Sumber Arsip

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Layanan dan Pemanfaatan merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka memenuhi kewajiban dan sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja merupakan satu kesatuan yang utuh dari beberapa komponen, yang terdiri atas perencanaan kinerja, pengukuran, dan evaluasi. Hal tersebut tertuang sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Dengan demikian maka Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Layanan dan Pemanfaatan disusun berdasarkan ketentuan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan selama Tahun Anggaran 2023.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Visi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong kemudian Misi Presiden Republik Indonesia Produktif, Merata dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dari visi dan misi Presiden Republik Indonesia tentunya terkait dengan visi misi ANRI yaitu Visi ANRI Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan

Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Hal ini tertuang dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Misi ANRI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.” dan “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, dengan uraian sebagai berikut:

1. memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Layanan dan Pemanfaatan sesuai dengan visi misi dari Arsip Nasional Republik Indonesia di poin 4 dan 5. Berdasarkan pasal 53 Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang layanan dan pemanfaatan arsip. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana pasal 53 sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang layanan arsip statis dan bahan pustaka, penerbitan naskah sumber dan pameran arsip, pengelolaan materi diorama, serta *Memory of the World* (MoW);
2. penyiapan pemberian bimbingan di bidang layanan arsip statis dan bahan pustaka, penerbitan naskah sumber dan pameran arsip, pengelolaan materi diorama, serta *Memory of the World* (MoW); dan
3. penyiapan pengendalian di bidang layanan arsip statis dan bahan pustaka,

penerbitan naskah sumber dan pameran arsip, pengelolaan materi diorama, serta *Memory of the World* (MoW).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan dibantu oleh jabatan fungsional arsiparis, pustakawan dan penerjemah yang tergabung dalam kelompok fungsional yang terdiri atas:

1. Kelompok Substansi Layanan Arsip Statis dan Pusat Studi yang dipimpin oleh seorang Koordinator ;
2. Kelompok Substansi Pemanfaatan Arsip yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
3. Kelompok Substansi Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi yang dipimpin oleh seorang Sub Koordinator.
4. Kelompok Substansi *Memory of The Nation* dan (*Memory of the World*) yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis kinerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan mengacu pada pencapaian visi Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu “Menjadikan Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dicapai pada tahun 2025”. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai Direktorat Layanan dan Pemanfaatan pada Tahun 2023 sebagaimana Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pemanfaatan arsip bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan layanan dan pemanfaatan, baik langsung secara manual maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi secara jarak jauh dan daring (*on-line*) yang terkoneksi dengan lembaga kearsipan daerah dan lembaga kearsipan internasional.
- b. Menyajikan atau tersedianya informasi arsip periode kolonial secara utuh dalam tahap pengumpulan sumber (*heuristik*) merupakan sumbangan besar dalam penulisan historiografi Indonesia, dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Meningkatkan promosi pemanfaatan arsip melalui penerbitan-penerbitan naskah sumber arsip, publikasi pameran arsip statis, dan visualisasi arsip/dokumen sejarah bangsa dengan tujuan penyelenggaraannya sebagai penyebaran informasi arsip baik langsung secara manual maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi secara jarak jauh dan daring (*on-line*) yang terkoneksi dengan lembaga kearsipan daerah dan lembaga kearsipan internasional dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arsip statis, khasanah arsip ANRI melalui penyediaan sumber arsip statis pada pembangunan diorama sejarah perjalanan bangsa di setiap Propinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Dengan tujuan akan terciptanya semangat persatuan

dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Memperkaya visualisasi arsip/dokumen sejarah bangsa dalam rangka memberikan pembelajaran bagi generasi saat ini dan yang akan datang tentang tokoh-tokoh nasional yang divisualisasikan secara transparan sesuai dengan sumber arsip yang tersedia di ANRI. Diharapkan dengan diterbitkannya visualisasi tokoh-tokoh nasional baik langsung secara manual maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi secara jarak jauh dan daring (on-line) yang terkoneksi dengan lembaga kearsipan daerah dan lembaga kearsipan internasional sehingga dapat tumbuh semangat patriotisme, kebangsaan dan persatuan bangsa Indonesia.

B. Perjanjian Kinerja 2023

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70
2. Meningkatkan penggunaan Layanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	1. Jumlah Pengguna Layanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	384.085 Pengguna
	2. Persentase jumlah pengguna arsip yang memanfaatkan arsip sebagai sumber penelitian	14%

Kegiatan :

Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip

- Mengkoordinasikan Penyusunan Konten Galeri Perbatasan kerja sama dengan Pusat Sistem dan Jaringan Kearsipan Nasional
- Mengkoordinasikan Pengelolaan Pameran (Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Studi Kebencanaan)
- Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan serta monitoring dan evaluasi inovasi. LARISSA sebagai praktik baik (best practice) ANRI

Direktorat Layanan dan Pemanfaatan pada tahun 2023 telah menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Direktur Layanan dan Pemanfaatan

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan pada tahun 2023 sebagaimana digambarkan pada table di atas dengan Jumlah Anggaran kegiatan Layanan dan Pemanfaatan sebesar Rp 3,186,191,000 (Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu : **tanpa** penghitungan anggaran Pusat Studi Arsip Kepresidenan yang masih melekat pada RO Direktorat Layanan dan Pemanfaatan).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Program kerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kinerja Tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2023. Rencana Kinerja tersebut telah dijabarkan sesuai dengan program dan kegiatan tahun 2023 berdasarkan fungsi Direktorat Layanan dan Pemanfaatan. Adapun Untuk mengetahui keberhasilan rencana kinerja yang direncanakan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan didasarkan pada Indikator dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana digambarkan pada tabel 1.

Untuk Sasaran Program dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan dengan Indikator Kinerja : Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan dengan target 70 dan Sasaran Program dan Kegiatan Peningkatan penggunaan Layanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa dengan Indikator Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa yaitu 384.085 Pengguna dan Persentase jumlah pengguna arsip yang memanfaatkan arsip sebagai sumber penelitian yaitu 14 % (*secondary indicator*). Di samping hal tersebut, beberapa kegiatan diamanahkan kepada Direktorat Layanan dan Pemanfaatan sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan Konten Galeri Perbatasan kerja sama dengan Pusat Sistem dan Jaringan Kearsipan Nasional;
- b. Mengkoordinasikan Pengelolaan Pameran (Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Studi Kebencanaan)
- c. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan serta monitoring dan evaluasi inovasi. LARISSA sebagai praktik baik (best practice) ANRI

2. Evaluasi Kinerja

A. Capaian Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan

Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan diukur dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Arsip Statis ANRI setiap

tahun selama 1 bulan dengan jumlah sampling masing-masing 30 orang pengguna. Indeks ini merupakan pendukung Indeks Kinerja Program Deputi Bidang Konservasi Arsip. Seperti diketahui bahwa 3 unsur utama pelayanan adalah : organisasi, pengguna dan kepuasan pengguna, maka indeks kepuasan pengguna inilah yang diukur sebagai pendukung indeks layanan informasi, sebagai IKP Deputi Konservasi Arsip.

Survey Kepuasan Masyarakat tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara layanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU Nomor 25 tahun 2009 maupun PP Nomor 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan arsip statis yang diselenggarakan oleh Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017, telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Hasil survei tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Maksud dan tujuan dalam Rekap Nilai SKM dari pengguna Layanan Arsip Statis bertujuan antara lain

- a. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- b. Mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit Layanan Arsip Statis secara periodik;
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- d. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan Layanan Arsip Statis di lingkungan ANRI;
- e. Masyarakat/ pengguna dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit Layanan Arsip Statis.

Metode yang digunakan dari kegiatan rekap nilai IKM dari SKM adalah dengan menggunakan kuesioner secara daring yang disebarakan kepada pengguna layanan arsip statis. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari : 1) system, mekanisme, dan prosedur, 2) kompetensi pelaksana 3) persyaratan 4) perilaku pelaksana 5) waktu penyelesaian 6) produk spesifikasi jenis pelayanan 7) biaya/ tarif 8) Sarana dan prasarana. Sementara itu, metode yang digunakan untuk kegiatan rekap pengguna layanan arsip statis dengan menjumlahkan total pengguna di buku tamu dan pengguna penelusuran online. Sebagai sampling 30 orang pengguna dalam 1 bulan selama 1 tahun.

Berdasarkan Rencana Kinerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, target indeks layanan informasi kearsipan sebesar 70. Berdasarkan perhitungan capaian realisasi fisik Tahun 2023, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan telah melebihi target. Realisasi fisik Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan (juga merupakan IKP Dekon) pada Tahun 2023 mencapai **85.53** sebagaimana tertuang dalam tabel/ diagram berikut :

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	82.33
2	Februari	81.63
3	Maret	84.89
4	April	83.48
5	Maret	82.86
6	Juni	81.93
7	Juli	85.63
8	Agustus	90.17
9	September	87.26
10	Oktober	90.73
11	November	90.27
12	Desember	85.16
Total		1,026.34
Rata - rata		85.53

Tabel 2 Capaian Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan (SKM)

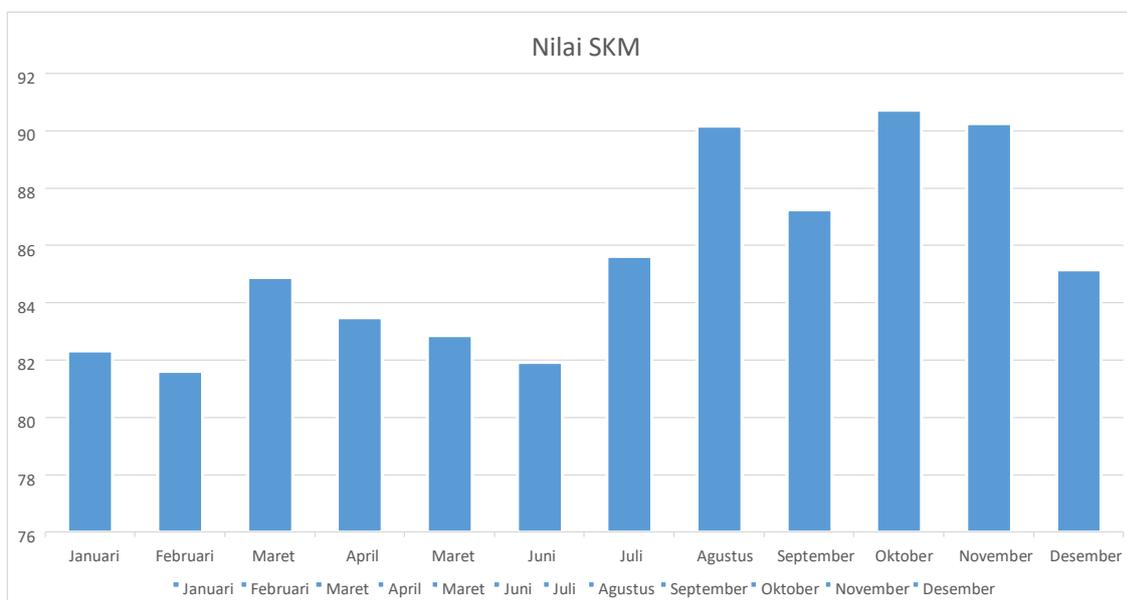


Diagram 1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Januari s.d Desember 2022

B. Jumlah Pengguna Layanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional wajib menjamin kemudahan akses arsip statis bagi pengguna arsip. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dalam kerangka ;pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi cerminan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat.

Tiga unsur penting dalam pelayanan publik yaitu organisasi/ lembaga penyelenggaran pelayanan publik, orang/masyarakat/organisasi yang berkepentingan atau penerima layanan, serta kepuasan pelanggan dalam menerima layanan yang menjadi perhatian bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik.

Dari ketiga unsur layanan publik tersebut, sangat jelas bagaimana peran pengguna dan kepuasan pengguna bagi penyelenggara pelayanan publik.

Capaian Pengguna sebagaimana diamaatkan Rencana Strategi Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2020, maka pengguna Layanan Arsip Statis dihitung secara nasional meliputi pengguna arsip statis pada lembaga kearsipan pusat dan lembaga kearsipan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2023, target jumlah pengguna layanan arsip statis berjumlah 384.085 orang, dengan capaian berjumlah 464.108 orang (120,83%).

Diagram 1



Diagram 2 Target dan Realisasi Pengguna Arsip Tahun 2023

Adapun jumlah pengguna tersebut diperoleh dari akumulasi sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini :

No	Unit Kerja/kegiatan	Jumlah
1	Pengguna Layanan Arsip Statis	44,977
2	LKD Prov/Kab/Kota (27 LKD)	247,432
3	Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi	6,128
4	Arsip Hari Ini	165,571
Total		464,108

Tabel 3 Unsur Jumlah Pengguna Layanan Arsip Tahun 2023

Berikut diagram pengguna Layanan Arsip Statis yang terdiri pengguna lokal offline 3.703 orang, pengguna lokal online 344 orang, pengguna warga negara asing offline 78 orang, pengguna warga negara asing secara online 57 orang, pengguna baru 1325 orang serta share pameran virtual Arsip Hari Ini 39.470 orang.



Diagram 3 Jumlah Pengguna Layanan Arsip Statis ANRI

Penyumbang jumlah pengguna lainnya adalah pengguna layanan arsip LKD Provinsi/ Kabupaten/Kota. Terdapat 27 LKD yang telah mengisi survey layanan arsip statis, yaitu :

1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima,
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro,
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur,
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang,
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kayong Utara,
6. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya,
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan,
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi,
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau,
10. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil,
11. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah,
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis,
13. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta,

14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan,
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk,
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas,
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan,
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung,
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang,
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal,
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan,
22. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam,
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah,
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang,
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru
26. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Barat Daya
27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau

Hasil survey jumlah penggun/ pengunjung layanan arsip statis LKD Provinsi/Kabupaten/Kota digambarkan dalam diagram berikut :



Diagram 4 Jumlah Pengguna Layanan Arsip Statis LKD

Dari data yang dikumpulkan melalui survei, terdapat 247,432 pengunjung layanan arsip statis di 26 LKD selama periode Januari-November 2023. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal di Provinsi Jawa Tengah merupakan LKD yang menyumbang paling banyak pengunjung layanan arsip statis, yaitu sebanyak 141.439 orang atau setara dengan 53% dari total jumlah pengunjung di 26 LKD. Selain itu, seluruh LKD yang mengisi survei telah memiliki sarana bantu temu kembali arsip statis berupa inventaris, daftar, maupun guide arsip dengan jumlah yang bervariasi.

Sebanyak 22 LKD pengisi survei telah memiliki SOP-AP Layanan Arsip Statis yang digunakan sebagai dasar operasional kegiatan pelayanan arsip statis. Sisanya, sebanyak 5 LKD belum memiliki SOP-AP Layanan Arsip Statis. Berkaitan dengan program Daftar Arsip Statis Tertutup, sebagian besar LKD yang mengisi survei (17 instansi) belum memiliki Daftar Arsip Tertutup, sementara 7 LKD sudah memiliki dan 3 LKD sedang mengerjakan.

Tidak hanya menyelenggarakan layanan arsip statis, sebanyak 12 LKD yang mengisi survei juga telah melaksanakan pameran pada tahun 2023, baik daring maupun luring. Sementara itu, sebanyak 15 LKD belum mengadakan pameran. Tabel di bawah menunjukkan jumlah pengunjung pameran di 27 LKD pada tahun 2023.

Sebagai fungsi layanan arsip tematis, Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi (Pusdankor) dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa masih terbilang baru dalam memberikan pelayanan publik. Pusdankor yang diresmikan pada tahun 2020 ini sedang dalam fase mempublikasikan arsip bertema antikorupsi kepada masyarakat. Untuk itu tidaklah berlebihan jika pengguna/ pengunjung berbagai even dianggap memberikan sumbangan terhadap jumlah pengguna layanan arsip statis secara kolektif yakni sebanyak 6,128 pengguna yang digambarkan sebagai berikut :



Diagram 5 Pengguna Layanan Pusdankor

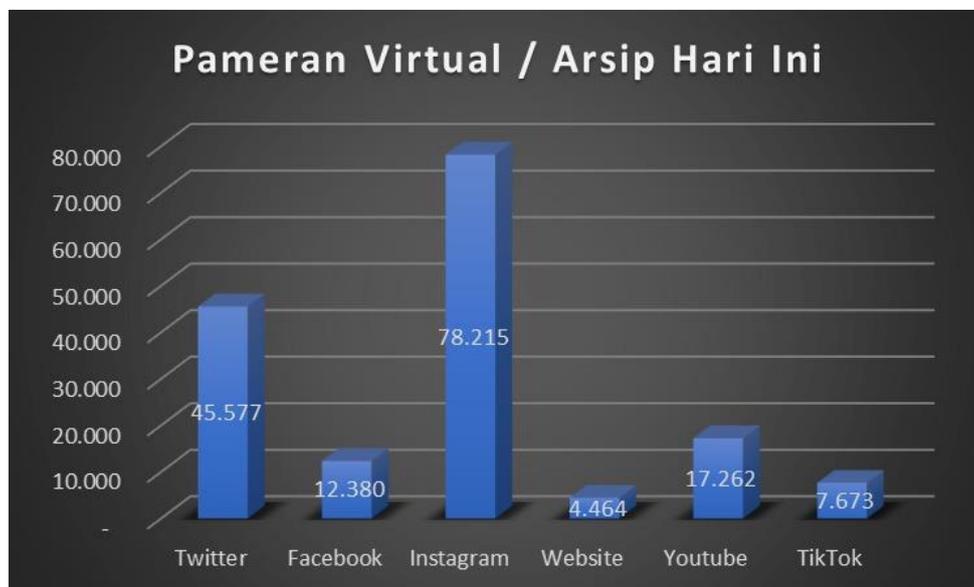


Diagram 6 Pengguna Interaksi Pameran Virtual AHI

Kontributor selanjutnya untuk pengguna arsip berasal dari pengguna/pengunjung pameran virtual Arsip Hari Ini khusus untuk yang interaksi di media sosial Arsip Nasional RI yakni di twitter (45.577), facebook (12380), instagram (78.225), website (4.464), youtube (17.262) dan tiktok (7673).

Mengingat banyaknya jumlah pengguna arsip statis baik yang langsung ke ruang baca maupun yang mengunjungi pameran online maupun onsite, maka perlu diketahui berapa orang pengguna yang benar benar memanfaatkan arsip sebagai sumber penelitian. Idealnya, jumlah pegguan arsip yang memanfaatkan arsip sebagai sumber penelitian dapat diukur dari output karya

pengguna tersebut. Berapa banyak buku yang dihasilkan, berapa banyak karya tulis yang dihasilkan, berapa banyak tugas akhir yang dihasilkan. Namun demikian, mengingat instrumen ini belum diimplementasikan, maka jumlah pengguna yang dianggap memanfaatkan arsip sebagai sumber penelitian adalah pengguna yang benar-benar hadir di ruang baca/ layanan arsip statis baik ANRI maupun Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun demikian, secara logika pengguna yang memang datang ke ruang Baca hampir dapat dipastikan mereka sedang melaksanakan riset dengan berbagai tujuan.

Dari 14% (dari target jumlah pengguna keseluruhan) yang ditargetkan diperoleh target jumlah pengguna arsip yang memanfaatkan arsip sebagai sumber penelitian berjumlah 53.772 pengguna. Sementara itu diperoleh jumlah pengguna kumulatif dari pengunjung Ruang Baca ANRI dan LKD Provinsi Kabupaten/Kota berjumlah 259.067 pengguna. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian jumlah pengguna arsip yang memanfaatkan arsip sebagai sumber penelitian berjumlah 259.067 orang atau setara dengan 481% sebagaimana digambarkan pada diagram berikut :

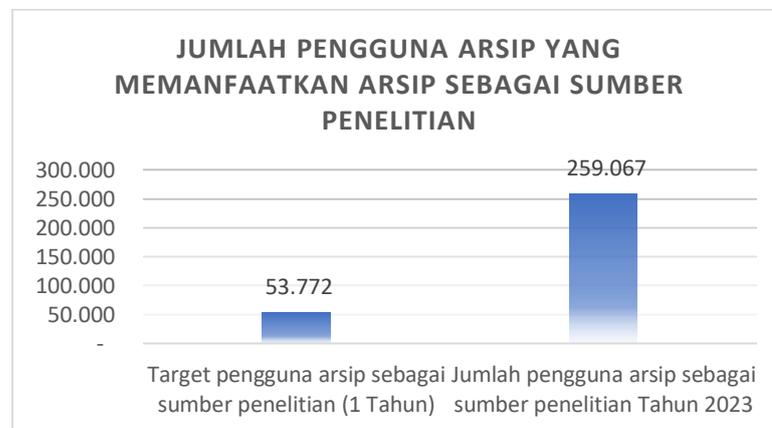


Diagram 7

Pengguna yang Memanfaatkan Arsip sebagai Sumber Penelitian

C. Kegiatan Lainnya yang Mendukung Indeks Kinerja Kegiatan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada table 1 terdapat Amanah pendukung IKK yang diberikan kepada Direktorat Layanan dan Pemanfaatan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan Konten Galeri Perbatasan kerja sama dengan Pusat Sistem dan Jaringan Kearsipan Nasional;

Daerah perbatasan merupakan daerah strategis dan krusial sebagai wilayah terdepan bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus, salah satunya bidang kearsipan. Bagaimana arsip pun dituntut hadir di perbatasan sebagai salah satu gambaran hadirnya negara di wilayah terdepan yang berhadapan dengan bangsa lain. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pameran galeri perbatasan di Skouw, Papua yang dibuka pada tanggal 17 November 2023. Pameran ini merupakan kerja sama Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Badan Negara Pengelola Perbatasan (BNPP).



Gb. 1 Galeri Perbatasan Papua



Gb. 2 Tinjauan Pameran oleh Sestama BNPP dan Deputi Bidang Konservasi serta Deputi Bidang IPSK ANRI

- b. Mengkoordinasikan Pengelolaan Pameran (Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Studi Kebencanaan)

Mengkoordinasikan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa (DSPB)

Direktorat Layanan dan Pemanfaatan sesuai dengan amanat Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI memiliki tugas untuk menyusun konten Diorama. Lebih lanjut amanat tersebut dituangkan ke dalam Surat Perintah Deputi Bidang Konservasi Arsip mengenai Tim DSPB.

DSPB yang terdapat di ANRI diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009. Menilik perkembangan teknologi informasi, dan dinamika kontennya, Diorama ini perlu direvitalisasi dan diredesign. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Layanan dan Pemanfaatan pada tahun 2023 yaitu mengadakan studi banding dengan beberapa museum baik di Jakarta maupun Yogyakarta, yaitu : Museum Nasional, Museum Modern and Art Contemporary Art in Nusantara (Macan), updateing data pahlawan nasional di Kementerian Sosial RI serta Diorama di Dinas Kearsipan Jogjakarta. Pada tahun 2023 pun kami telah mengajukan new inisiatif/ ABT untuk revitaslisai DSP sebesar Rp. 8.734.958.000,00 namun belum mendapat persetujuan instansi terkait.



Gb. 3 Hall A DSPB, tampak computer yang terhubung ke layar

Mengkoordinasikan Pameran Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi

Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi diresmikan pada tahun 2020 saat ini bertempat di Arsip Nasional RI Jalan Teuku Alawiyah (Warung Buncit). Sebagai fungsi baru (berdasarkan Keputusan Kepala ANRI) berbagai upaya dilakukan untuk menyajikan arsip tema pemberantasan korupsi yang tersimpan di ANRI, salah satunya melalui kegiatan pameran. Ruang Pameran sendiri terdapat di lantai 3 gedung Pusdankor dan perlu segera diremajikan mengingat sudah kurang layak untuk disajikan ke masyarakat (sudah mengelupas, banyak gambar yang lepas).

Pada tahun 2023 untuk meunjang pameran Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi telah dilaksanakan pameran arsip dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia di Istora Senayan Jakarta yang merupakan kerja sama ANRI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.



Gb. 4 Booth Pameran Arsip Hari Anti Korupsi Sedunia

Mengkoordinasikan Pameran Pusat Studi Kebencanaan

Dalam tahun 2023, tidak terdapat kegiatan Pameran di BAST, sehingga amanat ini tidak dapat diimplementasikan.

- c. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan serta monitoring dan evaluasi inovasi LARISSA sebagai praktik baik (*best practice*) ANRI

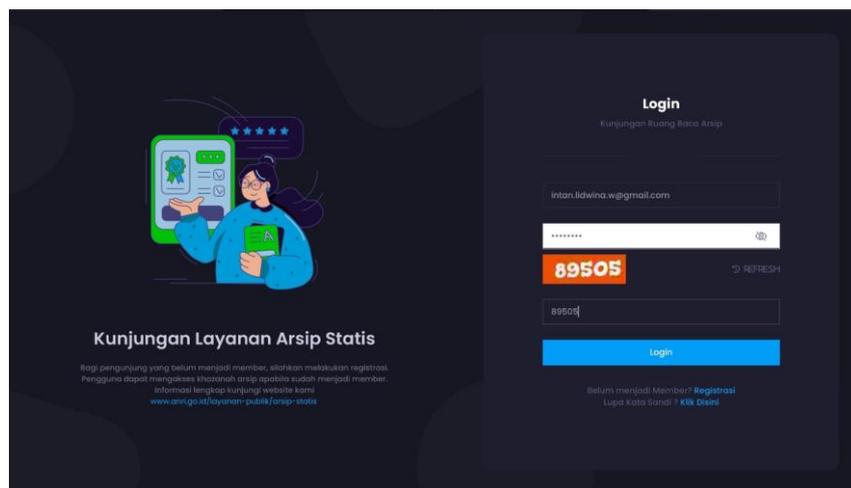
Layanan Arsip Statis Direktorat Layanan dan Pemanfaatan merupakan salah satu Praktik Baik ANRI. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, transformasi digital layanan arsip statis merupakan satu keharusan jika tidak ingin ditinggalkan oleh pengguna. Beberapa terobosan telah dilakukan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, seperti Antrian on line, SIUL (panggilan kepada pengguna sesuai urutan) dan terakhir aplikasi LARISSA merupakan layanan arsip online yang telah diluncurkan pada 19 Desember 2023.

Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ini bertujuan untuk :

- D. Mengetahui info-info kearsipan, website-website Layanan Arsip, download sarana bantu di beranda;

- E. Melakukan pencarian cepat arsip dengan berdasarkan kata kunci atau pilihan koleksi;
- F. Melakukan pemesanan penggandaan/refroduksi arsip secara on line;
- G. Melakukan permohonan penelusuran arsip secara on line, serta
- H. Menu khusus arsip penanganan covid 19.

Saat ini aplikasi LARISSA sedang uji coba implementasi dengan para pengguna, telah ada 20 anggota yang mendaftar sebagai anggota.



Gb. 6 Beranda Depan Aplikasi LARISSA

3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

A. Indeks Layanan Informasi Kearsipan

Seperti dijelaskan pada tabel 2 dan diagram 1, bahwa Indeks Layanan Informasi Kearsipan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan yang merupakan pendukung IKP Deputi Bidang Konservasi Arsip merupakan hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diukur dari Januari sd. Desember 2023 dengan jumlah responden 30 orang per bulannya. Nilai SKM Direktorat Layanan Pemanfaatan pada tahun 2023 : 85,53 dengan kategori BAIK jauh melampaui yang ditargetkan : 70 (121%).

Capaian tersebut diantaranya dapat disebabkan adanya pembenahan SOP layanan arsip statis semula memberi layanan dalam waktu 22 hari menjadi 1 hari (57 menit), berbagai kegiatan pengembangan kapasitas dengan nara sumber dari internal ANRI juga memperkuat kemampuan para arsiparis khususnya arsiparis baru di Layanan Arsip Statis dalam memberikan layanan. Beberapa inovasi seperti siul dan aplikasi online juga sudah diterapkan.

Untuk lebih jelasnya, gambaran hasil SKM digambarkan dalam table berikut ini :

Unsur Pelayanan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Nilai Rata-rata pertahun
1. Persyaratan :	3.17	3.17	3.33	3.33	3.43	3.43	3.43	3.56	3.44	3.79	3.72	3.34	3.44
2. Prosedur :	3.13	3.07	3.37	3.4	3.1	3.2	3.4	3.56	3.49	3.61	3.72	3.34	3.37
3. Waktu Penyelesaian :	3.18	3.2	3.31	3.3	3.24	3.26	3.33	3.63	3.32	3.41	3.31	3.09	3.32
4. Produk spesifikasi layanan :	3.20	3.07	3.37	3.4	3.3	3.2	3.27	3.59	3.36	3.67	3.13	3.19	3.32
5. Biaya/ tarif :	3.00	3.03	3.2	3	3.03	3.07	3.17	3.34	3.27	3.79	3.69	3.44	3.25
6. Kompetensi pelaksana :	3.60	3.63	3.5	3.57	3.67	3.47	3.6	3.78	3.64	3.64	3.75	3.66	3.63
7. Perilaku pelaksana	3.72	3.72	3.58	3.58	3.68	3.53	3.77	3.86	3.81	3.56	3.94	3.78	3.71
8. Penanganan, Saran dan Masukan :	3.33	3.47	3.43	3.27	3.23	3.13	3.37	3.59	3.56	3.64	3.67	3.38	3.42
9. Sarana dan prasarana :	3.33	3.07	3.5	3.23	3.17	3.23	3.53	3.56	3.56	3.61	3.61	3.47	3.41

Tabel 4 Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Dari 12 bulan Survei Kepuasan Masyarakat yang diambil, terdapat indikator yang memiliki nilai lebih kecil dari indikator lainnya. Nilai indikator pada nomor 5, yaitu pada unsur biaya/ tarif penggandaan arsip/ bahan pustaka memiliki nilai yang paling rendah, yaitu **3.25**. Sementara, nilai indikator yang paling tinggi ada pada indikator nomor 7, yaitu perilaku pelaksana atau keramahan dalam melayani pengguna memiliki nilai **3.71**.

Hal tersebut jelas tergambar bahwa pengenaan tarif PNBPN masih dianggap mahal dan memberatkan oleh sebagian pengguna. Sementara itu, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan pun memiliki target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang harus diserahkan kepada negara dalam rangka perbaikan mendukung kinerja pada Direktorat Layanan dan Pemanfaatan. Perlu ada strategi dan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Peraturan mengenai PNBPN perlu segera penyesuaian (saat ini sedang dalam pengajuan usulan perubahan tarif PNBPN melalui per ANRI 53). Strategi pemasaran juga perlu dikembangkan, bagaimana arsip dan naskah sumber dapat ditawarkan kepada masyarakat melalui *e commerce* flatform seperti shopee, tik tok, Tokopedia. Disamping itu mekanisme pembayaran juga perlu bervariasi tidak hanya melalui rekening tertentu yang disediakan ANRI namun juga melalui pintu pembayaran lainnya khususnya pengguna asing kesulitan jika harus membayar lewat rekening yang disediakan. Perlu memperketat kembali pengenaan pembiayaan penggandaan melalui mekanisme 0 rupiah dikembalikan kepada peraturan yang berlaku.

B. Jumlah Pengguna Layanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa

Seperti digambarkan pada table 2 bahwa jumlah pengguna layanan arsip statis mencapai 464.108 atau 120,83% dari target yang direncanakan. Pengguna tersebut berasal dari pengguna layanan arsip statis (Ruang Baca dan *Shared AHI*), Lembaga Kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi dan interaksi Pameran virtual Arsip Hari Ini. Unsur-unsur pengguna tersebut berada di dalam satu kesatuan KRO/RO Pengguna Layanan Arsip Statis sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa.

Penyumbang terbesar pengguna layanan arsip statis berasal dari Layanan Arsip Statis Lembaga Kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota (53,3%). Jika melihat proses penghitungan jumlah pengguna di tahun 2023, terdapat kendala dalam menghimpun jumlah pengguna dari LKD tersebut. Permintaan jumlah pengguna dari LKD sudah dua kali disebarkan melalui surat resmi bahkan diawali dengan kegiatan Rakornas Sinkronisasi dan Harmonisasi Layanan Arsip Statis, pun baru terkumpul di akhir tahun itu pun hanya berasal dari 27 instansi : 1 LKD provinsi, 26 dari LKD kabupaten/kota. Hal ini tentunya sangat memperihatinkan, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan belum dapat memotret secara akurat jumlah pengguna layanan ruang baca secara nasional. Di samping itu, terdapat kejanggalan jumlah yang diperoleh terdapat perbedaan yang signifikan melebihi jumlah pengguna layanan arsip di Ruang Baca, hal ini dapat disebabkan indikator pertanyaan yang kurang tepat atau pengisian yang tidak sssuai karena kesulitan pula untuk memberikan pengawasan.

Perlu ada komitmen bersama untuk mencapai target bersama. Hal ini tentulah diperlukan strategi dari ANRI. Payung hukum kebijakan layanan arsip statis perlu disesuaikan, perlu adanya pengikat agar terdapat kesamaan persepsi dan langkah yang sama antara ANRI dengan LKD Provinsi/Kabupaten/Kota. Apresiasi terhadap layanan arsip statis terbaik sepertinya harus diwujudkan sebagai motivasi bagi LKD Provinsi/Kabu/Kota untuk terus menerus meningkatkan kinerjanya. Selain itu kolaborasi dengan Unit Kerja Terkait di lingkungan ANRI perlu ditingkatkan untuk bersama sama mendorong LKD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan kinerja terbaik layanan arsip statisnya.

Dari diagram 7 diketahui bahwa jumlah pengguna yang benar-benar

memanfaatkan arsipnya sebagai sumber penelitian berjumlah 259.067 orang atau 481 % dari target yang ditetapkan. Kenaikan yang sangat signifikan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi jumlah pengguna ANRI (Ampera dan Pusdankor) 11635 pengguna dan LKD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai penyumbang terbesar berjumlah 247,432 pengguna. Jika melihat jumlah pengguna LKD yang berasal dari 27 LKD maka terlihat bahwa jumlah pengguna RB LKD melebihi pengguna di Ruang Baca ANRI. Hal ini tentunya masih perlu dipertanyakan, dengan fasilitas layanan arsip statis di LKD, namun capaian melebihi capaian Ruang Baca ANRI, maka besar kemungkinan ada bias dalam pengumpulan data pengguna yang benar-benar datang ke ruang baca. Bisa disebabkan indikator pertanyaan yang kurang sesuai, atau data yang diberikan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

Perlu adanya strategi dalam melakukan akumulasi data pengguna secara nasional tersebut seperti yang telah dijelaskan di atas baik dari aspek kebijakan maupun strateginya.

C. Kegiatan Lainnya yang Mendukung Indeks Kinerja Kegiatan

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan Konten Galeri Perbatasan kerja sama dengan Pusat Sistem dan Jaringan Kearsipan Nasional;

Galleri/ Pameran Perbatasan yang dilaksanakan tahun 2023 merupakan langkah awal kehadiran negara di wilayah perbatasan dengan tujuan untuk membangun nasionalisme kebangsaan, merasa menjadi satu bagian dari Indonesia. Galeri Perbatasan tersebut akan dilaksanakan berkesinambungan di seluruh Pintu Lintas Batas Negara (PLBN).

Pada tahun 2023 galeri perbatasan telah dilaksanakan, namun demikian beberapa hal dapat menjadi catatan antara lain ; perjanjian kerja sama dua instansi belum ditandatangani sehingga belum ada dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya, meskipun tetap dapat dilaksanakan. Kedua, pada 2023, kegiatan tidak direncanakan sebelumnya, sehingga harus menggeser dari kegiatan lain bahkan dari Direktorat lain di kedepitan Bidang Konservasi Arsip, sehingga terdapat hal-hal yang luput dari perencanaan seperti faktor kemahalan baik bahan pameran maupun transportasi hal ini tentunya menjadi catatan bagi Direktorat Layanan dan Pemanfaatan untuk perbaikan ke depannya.

- b. Mengkoordinasikan Pengelolaan Pameran (Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa,

Keberadaan DSPB dari aspek perkembangan teknologi informasi dapat dikatakan jauh tertinggal dibandingkan dengan museum/diorama khususnya yang ada di Indonesia apalagi internasional. Di samping itu, informasi di dalamnya pun harus segera di update terutama belum masuknya Presiden Jokowi di DSPB baik patung, mural maupun panel display.

Untuk itu revitalisasi baik dari aspek konten informasi maupun teknologi informasinya merupakan suatu keharusan. Namun demikian, mengingat kondisi keterbatasan anggaran karena setelah diajukan masih belum dapat disetujui, sepertinya konten mendesak yang perlu segera ditambahkan/ digantu adalah yang berkaitan dengan Presiden Bapak Joko Widodo, sehingga harus segera dianggarkan secara bertahap agar tidak terlalu membebankan anggaran ANRI.

- c. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan serta monitoring dan evaluasi inovasi LARISSA sebagai praktik baik (*best practice*) ANRI

Pada 19 Desember 2023, aplikasi LARISSA telah diluncurkan kepada para peserta temu pengguna layanan arsip statis. Saat ini sekitar 20 orang telah mendaftar sebagai members.

Sebelumnya pada tahun yang sama, aplikasi ini mendapat serangan *hacker* sehingga mengalami keterlambatan dalam peluncurannya karena harus disesuaikan/ diperbaiki ulang.

Hal ini tentunya menjadi catatan dan perhatian bersama, sinergi dengan unit kerja terkait terhadap pengamanan (firewall) dari ancaman serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, server back up sangat mendesak diperlukan untuk mengantisipasi jika ada serangan serupa di samping server aplikasi ini juga perlu ditambah.

Aplikasi layanan pengguna arsip seperti dijelaskan di atas belum sampai menampilkan image, sehingga memang ke depannya perlu pengembangan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Diharapkan munculnya aplikasi baru dapat berkolaborasi satu sama lain sehingga tidak berjalan masing-masing, seperti halnya LARISSA ini terus menyesuaikan sebagai embrio hilir dari aplikasi Sistem Informa Kearsipan Statis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rencana kinerja tahunan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan tahun 2023 dengan hasil akhir sebagai berikut:

1. Direktorat Layanan dan Pemanfaatan dari 2 indikator kinerja Utama telah dilaksanakan sesuai program kerja direktorat indikator kinerja Utama dengan capaian Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan sebesar 85,53 dengan Jumlah Pengguna Layanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa pada 2023 sebanyak 464.108 Orang atau 120.83% dengan Persentase jumlah pengguna arsip yang memanfaatkan arsip sebagai sumber penelitian sebesar 481%. Laporan Kinerja 2023 Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Tahun 2023 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan pada Tahun 2023, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan nasional. Laporan Tahunan 2023 ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja ANRI dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kearsipan Nasional. Laporan ini menyajikan capaian kinerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan pada Tahun 2023. Capaian kinerja pada Tahun 2023 telah memenuhi bahkan melebihi target, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki tidak hanya melibatkan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan namun bersinergi dengan unit kerja dan instansi terkait. Laporan kinerja tahun 2023 Direktorat Layanan dan Pemanfaatan diharapkan menjadi sumber informasi dalam perbaikan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Direktorat Layanan Pemanfaatan maupun ANRI untuk saat ini maupun di masa yang akan datang.

B. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektifitas kinerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan bukan hanya dalam *out put* melainkan juga dalam *out come* pada tahun-tahun mendatang disarankan sebagai berikut:

1. Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar unit kerja terkait untuk mendukung rencana kinerja yang telah ditetapkan.

2. Mendorong peningkatan kualitas arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di ruang baca melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemanfaatan arsip statis secara nasional.
3. Mendorong peningkatan masyarakat pengguna arsip statis sebagai informasi publik baik melalui ruang baca maupun website JIKN dan Laman ANRI melalui sosialisasi fasilitasi arsip statis.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Layanan dan Pemanfaatan,



Eli Ruliawati